

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli pada Toko Elektronik Kota Sungai Penuh, serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penyelesaian sengketa jual beli secara cash tempo di Toko Elektronik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan jual beli pada toko elektronik di kota Sungai Penuh masih ada yang belum sesuai sebagaimana diatur didalam ketentuan undang undang perlindungan konsumen, perlindungan hukum yang dapat digunakan oleh pelaku usaha adalah perlindungan hukum respresif dengan menggunakan pihak ketiga penengah konflik. Atas kendala dalam penyelesaian sengketa jual beli secara cash tempo di Toko Elektronik Kota Sungai Penuh antara lain sebagai berikut: 1. Konsumen tidak beritikad baik, 2. Kurangnya kekuatan hukum dalam perjanjian 3. Pelaku usaha masih menerapkan asas kepercayaan kepada konsumen, 4. Kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen, 5. Tidak tahunya pelaku usaha akan perlindungan hukum yang dapat diselesaikan oleh (BPSK). Dalam penyelesaiannya dengan bantuan (BPSK) berupa bantuan hukum yang dapat menjadi pihak ketiga atau penengah dalam sengketa pelaku usaha dan konsumen agar nantinya kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses litigasi atau peradilan yang panjang.

Kata kunci: perlindungan hukum, pelaku usaha, wanprestasi, hak dan kewajiban

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze the legal protection for the implementation of the sale and purchase agreement at the Sungai Penuh City Electronics Store, as well as to find out and analyze the obstacles in resolving cash sale and purchase disputes at the Electronics Store. The research method used is empirical Juridical. The result of this study is that the legal protection for the implementation of buying and selling in electronic stores in the city of Sungai Penuh is still not in accordance with the provisions of the consumer protection law, the legal protection that can be used by business actors is repressive legal protection by using a third party conflict mediator. The obstacles in resolving disputes over cash tempo buying and selling at the Sungai Penuh City Electronics Store include the following: 1. Consumers are not in good faith, 2. Lack of legal force in the agreement 3. Business actors still apply the principle of trust to consumers, 4. Lack of legal awareness of business actors and consumers, 5. Business actors do not know about the legal protection that can be completed by (BPSK). In the settlement with assistance (BPSK) in the form of legal assistance that can be a third party or mediator in disputes between business actors and consumers so that later both parties can reach an agreement without having to go through a long litigation or judicial process.

Keywords: *legal protection, business actors, default, rights and obligations*